

**ABDUL RIVAI: POTRET INTELEGENSIA BUMIPUTRA PADA AWAL ABAD  
KEDUA PULUH**

Miftahul Habib Fachrurozi, M. Pd.  
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi  
Email: miftahul.habib@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui perkembangan pendidikan Barat di Hindia Belanda pada abad kesembilan belas, (2) mengetahui Transformasi Elit Bumiputra Terpelajar pada Awal Abad Kedua Puluh, (3) mengetahui kiprah Abdul Rivai sebagai salah satu intelegensia bumiputra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahap pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Barat di Hindia Belanda memunculkan suatu kelompok sosial baru yang dikenal dengan istilah elit bumiputra terpelajar. Elit bumiputra terpelajar pada mulanya dirancang menjadi *pangreh praja* yang mendukung kekuasaan pemerintah kolonial, akan tetapi perubahan sosial politik pada awal abad kedua puluh melahirkan intelegensia bumiputra yakni elit bumiputra terpelajar yang memiliki perhatian terhadap isu-isu sosial. Abdul Rivai merupakan potret intelegensia bumiputra yang cukup berpengaruh pada awal abad kedua puluh. Gagasannya dalam *Bintang Hindia* merupakan suatu stimulus yang memberikan kesadaran sosial politik bagi kaum bumiputra. Gagasannya dalam *Bintang Hindia* serta pencapaian akademiknya merupakan inspirasi bagi intelegensia bumiputra pada masanya. Oleh karena itu, Abdul Rivai tetaplah harus diakui sebagai salah satu pionir intelegensia bumiputra yang memberi warna dalam dinamika sosial politik di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh.

**Kata Kunci:** Abdul Rivai, *Bintang Hindia*, Elit Bumiputra Terpelajar, Intelegensia Bumiputra

**ABDUL RIVAI: A PORTRAIT OF INTELLEGENCY OF BUMIPUTRA IN THE  
BEGINNING OF THE TWENTY CENTER**

Miftahul Habib Fachrurozi, M. Pd.  
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi  
Email: miftahul.habib@gmail.com

**Abstract-**This study aims: (1) to determine the development of Western education in the Dutch East Indies in the nineteenth century, (2) to find out the Transformation of educated elite Indigenous at the Beginning of the Twentieth Century, (3) to know Abdul Rivai's gait as one of the indigenous intellectual. This research uses the historical method which consists of the stages of gathering resources, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the implementation of Western education in the Dutch East Indies gave rise to a new social group known as the educated elite Indigenous. The educated elite Indigenous was originally designed to be a civil service commander who supported the power of the colonial government, but socio-political changes in the early twentieth century gave birth to the indigenous intellectual, the educated elite Indigenous who had an interest in social issues. Abdul Rivai is a portrait of indigenous intellectual which was quite influential in the early twentieth century. The idea in the *Bintang Hindia* is a stimulus that provides social political awareness for the indigenous people. His ideas on the *Bintang*

*Hindia* and his academic achievements were an inspiration to the indigenous intellectual of his time. Therefore, Abdul Rivai must still be recognized as one of the pioneers of indigenous intellectual who gave color to the socio-political dynamics in the Dutch East Indies at the beginning of the twentieth century.

**Keywords:** Abdul Rivai, *Bintang Hindia*, Educated elite Indigenous, Indigenous intellectual

## Pendahuluan

Hindia Belanda pada akhir abad kesembilan belas mengalami suatu perubahan sosial politik yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah kolonial. Perubahan kebijakan tersebut ditandai dengan perubahan sistem birokrasi yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Kebijakan tersebut juga mendorong munculnya kelas menengah baru dari kalangan bumiputra di Hindia Belanda (Hoogervorst & Nordholt, 2017: 443). Kelas menengah ini yang sebagian besarnya berasal dari kalangan elit bumiputra kemudian menjadi bagian penting dari sistem birokrasi pemerintah kolonial. Oleh karena itu, mereka juga mendapatkan pendidikan Barat untuk menunjang pekerjaan mereka dalam birokrasi kolonial. Pada awal abad kedua puluh, para elit bumiputra terpelajar ini bukan lagi hanya menjadi pegawai birokrasi kolonial, akan tetapi mulai memiliki peran sosial politik di Hindia Belanda.

Adalah politik etis yang mengubah peran dari para elit bumiputra terpelajar tersebut. Kegagalan pelaksanaan ekonomi liberal di Hindia Belanda membuat sejumlah tokoh mengkritik sistem tersebut. Salah satu kritik paling terkemuka berasal dari tokoh politik bernama C. T. Van Deventer. Ia menulis artikel berjudul "*Een Eereschuld*" (Hutang Budi) di jurnal *De Gids* yang berisi tuntutan penyelidikan tentang kewajiban balas budi bangsa Belanda terhadap kaum bumiputra akibat

kemerosotan kesejahteraan di era ekonomi liberal (van Niel, 2009 : 20). Gagasan Van Deventer ini rupanya mendapat dukungan dari Ratu Wilhelmina yang baru saja bertakhta. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menyampaikan seruan pembaruan kebijakan kolonial dalam sebuah pidato kerajaan. Pidato inilah yang dianggap sebagai titik awal pelaksanaan kebijakan Politik Etis.

Kebijakan Politik Etis memiliki pengaruh signifikan di Hindia Belanda. Salah satunya adalah berkembangnya semangat kemajuan di kalangan kaum bumiputra. Kemajuan diwujudkan dalam suatu keinginan mencapai status sosial yang ideal baik secara individu maupun kolektif yang meliputi kemajuan pendidikan, modernisasi, kehormatan, serta keberhasilan hidup (Latif, 2012b: 144). Wacana kemajuan inilah yang banyak berkembang dalam ruang publik di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh.

Wacana kemajuan ini tidak serta merta menyebar begitu saja. Perkembangan wacana kemajuan bagaimanapun membutuhkan aktor dan media yang menyebarluaskan wacana ini ke berbagai lapisan sosial. Adapun aktor yang menyebarluaskan gagasan kemajuan ini berasal dari suatu kelompok sosial baru pada awal abad kedua puluh di Hindia Belanda. Kelompok ini disebut sebagai intelegensia bumiputra. Intelegensia bumiputra merupakan suatu kelompok sosial baru yang memiliki karakteristik

sangat berbeda dibandingkan dengan kelompok sosial lain yang telah ada sebelumnya. Salah satu sosok penting yang menjadi potret dari kelas sosial baru ini adalah Abdul Rivai. Abdul Rivai bahkan dapat dikatakan sebagai seorang pionir diantara para intelegensia bumiputra di Hindia Belanda. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk menguraikan secara lebih jauh tentang apa saja yang dilakukan oleh Abdul Rivai dalam upayanya memajukan kaum bumiputra di Hindia Belanda.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni: (1) pengumpulan sumber; (2) kritik sumber; (3) interpretasi; serta (4) historiografi. Pengumpulan sumber sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber asli yang diperoleh dari pelaku sejarah sementara sumber sekunder merupakan sumber yang dituliskan oleh penulis selain pelaku sejarah berdasarkan sumber primer (Sjamsudin, 2012: 83). Sumber primer yang digunakan dalam artikel ini adalah artikel-artikel yang ditulis oleh Abdul Rivai pada surat kabar *Bintang Hindia* sementara sumber sekunder yang digunakan berasal dari berbagai buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan studi ini.

Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam ini adalah kritik sumber yang terdiri dari dua tahap yakni kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan dengan mengecek otentisitas dan integritas sumber sejarah terutama dari kondisi fisiknya sementara kritik internal dilakukan dengan mengecek isi dari sumber yang digunakan (Sjamsudin, 2012: 104-122). Berdasarkan hasil kritik sumber yang dilakukan terhadap sumber-sumber sejarah dalam artikel ini dapat disimpulkan jika sumber sejarah yang digunakan memiliki integritas serta konten yang kredibel

sehingga dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.

Penafsiran merupakan tahap selanjutnya dalam penelitian ini. Penafsiran terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sumber-sumber sejarah sementara sintesis berarti menyatukannya (Kuntowijoyo, 2013: 78-79). Penafsiran dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan sumber-sumber yang digunakan serta menghubungkan satu dengan yang lainnya agar terbentuk suatu makna yang utuh. Sementara itu tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah harus menekankan pada aspek kronologis (Kuntowijoyo, 2013: 80). Adapun penelitian ini berusaha untuk memenuhi aspek kronologis tersebut dengan melakukan penulisan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa. Hal tersebut tercermin dalam susunan pembahasan dalam artikel ini.

### Pendidikan Barat Bagi Kaum Bumiputra di Hindia Belanda pada Abad Kesembilan Belas

Akses terhadap pendidikan Barat bagi kaum bumiputra di Hindia Belanda baru dimulai setidaknya pada awal abad kesembilan belas. Selama berkuasa hampir dua abad, VOC enggan terlalu banyak mengurus kehidupan kaum bumiputra kecuali yang berkaitan dengan kepentingan eksploitasi ekonomi perusahaan dagang itu (Latif, 2012a: 95; Lombard, 2008: 94). Hal tersebut juga berlaku pada bidang pendidikan. Pendidikan dianggap tidak memiliki kaitan langsung bagi kepentingan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh VOC. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh kaum bumiputra sebelum abad kesembilan belas didominasi oleh pendidikan agama terutama Islam.

Peralihan kekuasaan dari VOC ke Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada awal abad kesembilan belas turut mengubah kebijakan pendidikan bagi

kaum bumiputra. Pemerintah kolonial mulai membuka sekolah yang diperuntukkan bagi kaum bumiputra. Akses pendidikan Barat bagi kaum bumiputra bermula pada dasawarsa kedua abad kesembilan belas tepatnya tahun 1816. Pada saat itu terdapat sejumlah kecil elit bumiputra yang diizinkan bersekolah di sekolah-sekolah Eropa (Van Niel, 2009: 47). Seiring dengan diberlakukannya kebijakan tanam paksa, akses pendidikan Barat bagi kaum bumiputra menjadi semakin luas. Pada tahun 1849, terdapat 20 sekolah bagi kaum bumiputra di ibukota setiap provinsi (Suratminto, 2013: 78). Upaya Pemerintah Kolonial untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi kaum bumiputra bukan tanpa alasan. Pendirian sekolah-sekolah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menunjang sistem tanam paksa yang memang saat itu tengah diberlakukan di Hindia Belanda.

Seiring dengan berjalannya waktu, sekolah-sekolah dengan keahlian yang lebih spesifik bagi kaum bumiputra mulai didirikan di Hindia Belanda. Pada tahun 1852, didirikan sekolah khusus guru yang dikenal dengan nama *Kweekschool* di Surakarta (Buchori, 2007: 12). Pendirian sekolah guru ini bertujuan untuk menyediakan tenaga pengajar dari kaum bumiputra agar mampu mengajari keterampilan dasar bagi sesama kaum bumiputra. Kebutuhan guru yang semakin mendesak membuat jumlah *Kweekschool* meningkat secara signifikan dan mulai menyebar ke berbagai daerah. *Kweekschool* lalu mulai didirikan di berbagai kota seperti Bukittinggi, Tapanuli, Manado, Ambon, Probolinggo, Banjarmasin, Makassar, dan sebagainya.

Perkembangan-perkembangan tersebut telah menunjukkan upaya dari Pemerintah Kolonial untuk memberikan pendidikan Barat bagi kaum bumiputra. Meskipun demikian, upaya tersebut masih terbilang parsial dan cenderung sporadis akibat ketiadaan departemen khusus yang menangani pendidikan bagi kaum

bumiputra. Sekolah-sekolah yang didirikan hanya sebatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek pemerintah kolonial dan dibangun dalam lingkup yang sangat terbatas.

Perubahan kebijakan pendidikan di Hindia Belanda dimulai sejak tahun 1864. Kerajaan Belanda mulai mengadopsi sebuah aturan yang dikenal dengan nama *comptabiliteitswet*. Inti dari kebijakan tersebut adalah anggaran tahunan yang digunakan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda harus diratifikasi terlebih dahulu oleh Parlemen Belanda (Frankema, 2013: 314). Kebijakan ini berdampak luas pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan di tanah koloni. Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah pembentukan Departemen Pendidikan di Hindia Belanda. Tujuan pembentukan Departemen ini adalah menyeragamkan pendidikan bagi kaum bumiputra yang selama ini berkembang secara sporadis dan tidak bersifat sentralistik.

Pembentukan Departemen Pendidikan tersebut berbarengan dengan perubahan corak ekonomi politik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial sejak tahun 1870 telah mengadopsi sistem perekonomian yang lebih liberal. Prinsip-prinsip Liberalisme seperti kebebasan individu, pengakuan atas hak milik pribadi, serta perluasan perusahaan swasta juga mulai diadopsi di Hindia Belanda. Hal ini secara tidak langsung turut mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan bagi kaum bumiputra. Masuknya perusahaan swasta di Hindia Belanda diiringi dengan kebutuhan tenaga kerja terampil. Di sisi lain, perubahan birokrasi pemerintah kolonial juga membutuhkan banyak tenaga administrasi. Pendidikan bagi kaum bumiputra kemudian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja dan tenaga administrasi terampil tersebut (Abdullah, 2017: 37). Sejak saat itu, akses pendidikan bagi kaum bumiputra semakin

terbuka meskipun masih terbatas pada kalangan elit semata.

Perluasan pendidikan Barat bagi kaum bumiputra bukan tidak meninggalkan sejumlah masalah. Sebagaimana VOC, Pemerintah Kolonial nampak masih setengah hati dalam menyelenggarakan perluasan pendidikan bagi kaum bumiputra. Di satu sisi, mereka membutuhkan kaum bumiputra yang terampil untuk mendukung liberalisasi ekonomi dan birokrasi kolonial modern. Di sisi lain, mereka juga khawatir jika keberadaan kaum bumiputra yang terpelajar akan mengancam superioritas orang-orang Belanda. Dengan kata lain, pemerintah kolonial selalu berupaya mencegah mobilitas sosial vertikal yang mungkin dilakukan oleh kaum bumiputra yang telah mengenyam pendidikan Barat. Oleh karena itu, pemerintah kolonial merancang sistem pendidikan yang diskriminatif dan anti asimilatif untuk menjaga agar superioritas orang Belanda terhadap kaum bumiputra tetap terjaga (Frankema, 2013: 318). Sistem pendidikan tersebut membuat stratifikasi sosial yang mendudukan kaum bumiputra sebagai masyarakat dengan kedudukan lebih rendah dari orang Belanda nyaris tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, satu hal yang tidak dapat dicegah oleh pemerintah kolonial adalah kemunculan kelompok sosial baru di kalangan bumiputra. Kelompok sosial itu disebut dengan istilah elit bumiputra terpelajar.

### **Dari *Pangreh Praja* ke Intelegensia Bumiputra: Transformasi Elit Bumiputra Terpelajar pada Awal Abad Kedua Puluh**

Liberalisasi ekonomi yang menuntut tersedianya tenaga kerja terampil serta pegawai birokrasi membuat pemerintah kolonial terpaksa melakukan perluasan pendidikan bagi kaum bumiputra. Meskipun pemerintah kolonial telah berupaya untuk meminimalisir asimilasi

budaya yang diakibatkan oleh pendidikan, namun upaya ini tidak benar-benar berhasil. Elit bumiputra yang mengenyam pendidikan Barat ini bagaimanapun telah bersentuhan dengan sistem pendidikan serta gaya hidup orang-orang Eropa. Hal inilah yang mempengaruhi pemikiran para elit bumiputra sekaligus menandai terbentuknya suatu kelompok sosial baru di Hindia Belanda.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada abad kesembilan belas mempraktikkan suatu sistem yang dikenal dengan istilah *Beambtenstaat*. *Beambtenstaat* merupakan suatu model negara apolitis yang menjadikan politik sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan negara dan bukan sebagai alat untuk melakukan protes sosial (Sutherland, 1983: 26). Sistem ini membuat pemerintah kolonial berupaya untuk melakukan kontrol terhadap kaum bumiputra di Hindia Belanda. Dalam upaya melakukan kontrol terhadap masyarakat di Hindia Belanda inilah pemerintah kolonial memanfaatkan kekuasaan tradisional yang telah berlangsung di Hindia Belanda sejak sebelum zaman kolonial. Pemanfaatan kekuasaan tradisional untuk kepentingan kekuasaan kolonial ini dikenal dengan istilah *indirect rule*.

*Indirect rule* membutuhkan mitra dari kaum bumiputra agar dapat berjalan dengan baik. Pemerintah kolonial kemudian memanfaatkan penguasa tradisional seperti para bupati ataupun keluarganya untuk menjalankan sistem *indirect rule* tersebut. Para penguasa tradisional ini kemudian bertransformasi menjadi penggerak mesin birokrasi kolonial yang dikenal dengan istilah *pangreh praja*. *Pangreh praja* merupakan loyalis pemerintah kolonial dalam upaya mengatur kaum bumiputra. Di sisi lain, para *pangreh praja* ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan kaum bumiputra dari kalangan rakyat biasa. Dengan demikian,

*pangreh praja* dapat dikatakan sebagai tiang penyangga pemerintah kolonial dalam upaya mempertahankan kekusaannya terutama dari ancaman dalam negeri (Sutherland, 1983: 28).

Pemerintah kolonial memandang perlunya membentuk pendidikan khusus untuk melatih para calon *pangreh praja* ini. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 1848 meskipun belum menunjukkan benar-benar dilaksanakan secara serius. Pada tahun 1866 dibentuklah sebuah sekolah khusus calon *pangreh praja* bernama *Hoofdenscholen* (sekolah para pemimpin) yang tersebar di Bandung, Magelang, dan Probolinggo (Sutherland, 1983: 52). Siswa *Hoofdenscholen* kebanyakan adalah putra-putra bupati yang direncanakan menggantikan ayahnya kelak. Akan tetapi, kurikulum di *Hoofdenscholen* tidak memuat pelatihan administrasi secara spesifik. Hal tersebut mengindikasikan jika pemerintah kolonial tidak terlalu menginginkan keterampilan administrasi dari calon *pangreh praja* tersebut, tetapi justru mendorong agar mereka tetap mempraktikkan pola-pola kekuasaan tradisional bila kelak telah menjabat.

Perubahan sosial yang terjadi di Hindia Belanda pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh mendorong kesadaran baru elit bumiputra terpelajar. Liberalisasi ekonomi pada mulanya dianggap mampu menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan di Hindia Belanda rupanya justru mengalami kegagalan. Perkembangan perkebunan gula yang cukup masif membuat lahan untuk menanam padi menjadi semakin sempit sekaligus mengakibatkan krisis pangan bagi kaum bumiputra di berbagai daerah (Simbolon, 2006: 168). Krisis inilah yang menjadi awal dari perubahan besar yang terjadi pada awal abad kedua puluh.

Penurunan kesejahteraan akibat ekonomi liberal segera menarik perhatian dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu,

pada tahun 1900 diberlakukan kebijakan Politik Etis yang meliputi program irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adapun salah satu tujuan politik etis adalah meningkatkan kesejahteraan kaum bumiputra (Nagazumi, 1989: 28). Pendidikan merupakan program sentral dalam politik etis dan perluasan pendidikan bagi kaum bumiputra merupakan langkah konkrit dari kebijakan tersebut. Salah satu perluasan tersebut terlihat pada perubahan *Hoofdenscholen* menjadi *Opleidingsscholen voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) pada tahun 1900. Reorganisasi juga dilakukan pada sejumlah sekolah milik pemerintah kolonial lainnya seperti *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA), *Nederlandsch-Indische Artsenschool* (NIAS), dan sebagainya. Perubahan ini juga diikuti oleh perluasan penerimaan calon siswa yang tidak hanya sebatas anggota keluarga bupati saja melainkan juga para *priyayi* rendah. Pada awal abad kedua puluh, diperkirakan lebih dari 100.000 orang bumiputra pernah mengenyam pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan milik pemerintah kolonial (Abdullah, 2017: 40). Meskipun demikian, pada umumnya pendidikan Barat hanya dapat diakses oleh para *priyayi* semata dan bukan bagi rakyat kebanyakan.

Kemerosotan Kondisi kaum bumiputra serta pemberlakuan politik etis tersebut mendorong kemunculan kelompok sosial baru sebagai bagian dari elit bumiputra terpelajar. Pada mulanya elit bumiputra berpendidikan Barat hanya dirancang sebagai *pangreh praja* yang mendukung kekuasaan kolonial. Perubahan sosial politik pada awal abad kedua puluh memunculkan kelompok sosial baru yang memiliki kesadaran terhadap isu-isu sosial. Kelompok sosial ini dikenal sebagai intelegensia bumiputra. Intelegensia muncul dari sebuah respon kolektif dari identitas kolektif tertentu, sebagai refleksi dari kesamaan kriteria pendidikan, psiko-sosiografis, sistem nilai, *habitus*, dan ingatan kolektif yang sama

(Latif, 2012a: 28). Adapun kesamaan identitas dari intelegensia ini adalah sama-sama mengenyam pendidikan Barat dan lebih daripada itu mereka juga terpengaruh terhadap ide-ide serta pengetahuan yang berasal dari Barat (Poeze, 1989: 88). Kuatnya pengaruh pemikiran Barat merupakan salah satu ciri utama intelegensia bumiputra.

Intelegensia bumiputra ini memiliki sejumlah perbedaan mencolok dibandingkan dengan para *pangreh praja*. Intelegensia bumiputra pada umumnya menentang *status quo* para *pangreh praja* (Sutherland, 1983: 116). Mereka secara radikal menolak dominasi sosial dan politik para *pangreh praja* di masyarakat. Selain itu, intelegensia bumiputra ini juga merasakan adanya praktik diskriminasi oleh pemerintah kolonial terhadap kaum bumiputra. Oleh karena itu, mereka berusaha melawan praktik dominasi dari para *pangreh praja* serta diskriminasi orang-orang Belanda terhadap rakyat biasa (Abdullah, 2017: 46). Kelompok intelegensia bumiputra inilah yang kemudian menjadi pionir untuk memperjuangkan kemajuan kaum bumiputra. Salah satu bagian dari intelegensia bumiputra tersebut adalah Abdul Rivai.

### **Abdul Rivai: Potret Intelegensia Bumiputra Pada Awal Abad Kedua Puluh**

Abdul Rivai berasal dari Minangkabau. Ia lahir pada tahun 1871 di Sumatera Barat (Poeze, 2008: 34). Sejak awal ia banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran Barat. Pengaruh pemikiran Barat ini yang menjadikannya salah satu intelegensia bumiputra yang sangat menonjol pada awal abad kedua puluh. Kemunculan Abdul Rivai sebagai bagian dari intelegensia bumiputra tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang terjadi di Sumatera Barat pada paruh kedua abad kesembilan belas. Latar belakang

inilah yang turut membentuk gagasan serta kesadaran Rivai sebagai bagian dari intelegensia bumiputra.

Perubahan sosial yang terjadi di Minangkabau pada paruh kedua abad kesembilan belas tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah kolonial di Sumatera Barat pada masa itu. Kekalahan kaum Adat dan Paderi dalam Perang Paderi pada pertengahan abad kesembilan belas menjadi titik awal perubahan tersebut. Sejak saat itu pengaruh pemerintah kolonial mulai masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau. Salah satu kebijakan yang diberlakukan pemerintah kolonial di Sumatera Barat adalah Tanam Paksa Kopi. Kebijakan tersebut diprakarsai oleh Gubernur Pesisir Barat Sumatera, Andreas Victor Michiels (Suryani, Zed, & Hardi, 2019: 14).

Pemberlakuan kebijakan tanam paksa kopi di Sumatera Barat ini memberikan dampak luas bagi masyarakat Minangkabau. Pemerintah Kolonial mulai membangun infrastruktur pendukung penanaman kopi di Minangkabau. Salah satu caranya ialah dengan membangun jalan-jalan baru untuk mempermudah distribusi kopi ke luar Minangkabau (Colombjin, 2005: 23-24). Pembangunan transportasi di Sumatera Barat ini memberikan dampak signifikan. Interaksi anggota masyarakat baik sesama orang Minangkabau maupun yang berasal dari luar daerah menjadi lebih erat. Kondisi ini mempengaruhi watak masyarakat Minangkabau yang menjadi lebih terbuka dan cenderung kosmopolitan. Sebagai orang Minangkabau, Abdul Rivai mendapat banyak pengaruh dari karakter umum masyarakatnya.

Perubahan sosial masyarakat Minangkabau menjadi semakin dinamis ketika memasuki era 1870-an. Masyarakat Minangkabau yang semakin terbuka dengan orang dari luar wilayahnya mulai terkena dampak modernisasi. Masyarakat Minangkabau mulai menghadapi sejumlah

permasalahan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Salah satu permasalahan tersebut adalah permasalahan dalam bidang birokrasi pemerintah. Pemerintah kolonial membutuhkan pegawai rendah dari kalangan bumiputra yang mampu membantu tugas-tugas di kantor-kantor milik pemerintah (T. Abdullah, 1972: 212). Pemerintah kolonial merespon hal tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan Barat di Minangkabau. Sekolah-sekolah baru mulai didirikan. Tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan pegawai birokrasi yang menguasai baca-tulis. Para peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial. Orang-orang Minangkabau banyak yang tertarik untuk belajar di sekolah-sekolah tersebut.

Orang-orang yang mengenyam pendidikan Barat mendapatkan kedudukan terhormat dalam masyarakat Minangkabau. Keinginan untuk menjadi sebuah masyarakat yang maju menjadi alasan utama hal tersebut. Selain itu penguasaan bahasa Belanda yang menjadi syarat utama menjadi pegawai birokrasi kolonial, nampaknya memiliki gengsi tersendiri dalam masyarakat Minangkabau (Graves, 2007: 213). Keinginan kuat untuk menjadi masyarakat yang maju ini membuat banyak orang Minangkabau yang akhirnya berupaya menempuh pendidikan Barat.

Masyarakat Minangkabau banyak menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu sekolah lanjutan yang banyak dituju adalah *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA). STOVIA merupakan sekolah pendidikan dokter pribumi yang terletak di Batavia. STOVIA pada mulanya bukanlah sekolah bergengsi bagi masyarakat Minangkabau maupun masyarakat pribumi pada umumnya. Gaji seorang tenaga medis yang kecil menjadi alasan utamanya. Hal ini mulai berubah ketika pemerintah

kolonial memutuskan untuk memberikan beasiswa gratis untuk menempuh sekolah dasar Eropa bagi mahasiswa STOVIA (Van Niel, 2009: 83). Mahasiswa STOVIA juga dijanjikan mendapatkan ikatan dinas menjadi pegawai kesehatan pemerintah setelah menyelesaikan studinya. Sejak saat itu gengsi STOVIA mulai meningkat dan menjadi salah satu sekolah favorit bagi masyarakat pribumi.

Pada awal abad kedua puluh gengsi para lulusan STOVIA meningkat secara drastis. Para dokter bumiputra ini menjadi kelompok sosial yang nyaris sepenuhnya mengadopsi budaya dan kehidupan orang Eropa (Pols, 2019: 30). Pendidikan kedokteran modern yang mereka tempuh telah mengubah kebiasaan serta pola pikir para dokter bumiputra ini. Perubahan tersebut terlihat dari gaya hidup, gaji yang cukup tinggi, kemampuan berbahasa Belanda yang baik serta sejumlah kebiasaan lain yang sebelumnya hanya dilakukan oleh orang-orang Eropa saja. Berbagai keistimewaan tersebut membuat para dokter lulusan STOVIA ini dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat bumiputra pada umumnya.

Abdul Rivai menjadi salah satu mahasiswa STOVIA. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 1894 (Rahzen, 2007: 12). Rivai tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pekerjaan. Ia kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai dokter pemerintah di Deli, Sumatera Utara. Rivai kemudian mulai menjalani profesi sebagai dokter pemerintah di sana. Ia lalu merasa tidak puas dengan pekerjaannya tersebut. Ketidakpuasannya disebabkan oleh apresiasi yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap kemampuan Rivai tidak sesuai dengan harapannya. Ia lalu memutuskan pindah ke Belanda untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia lalu pindah ke Belanda pada tahun 1899 untuk belajar pada bekas dosennya di STOVIA dahulu, Profesor Eykman (Poeze, 2008: 34).

Selain melanjutkan studi, Abdul Rivai juga berkarir dalam bidang jurnalistik. Ia memulai karir jurnalistiknya di Belanda dengan aktif menulis pada beberapa surat kabar seperti *Bendera Wollanda*, *Pewarta Wollanda*, *Oost en West*, dan *Algemeen Handelsblad* (Rahzen, 2007: 12). Seluruh surat kabar tersebut terbit di Amsterdam. Rivai tidak hanya membatasi kegiatannya pada bidang jurnalistik saja. Ia juga aktif sebagai guru bahasa Melayu pada kursus bahasa di Berlitz (Poeze, 2008: 35). Hal ini menunjukkan jika Rivai memang seorang intelegensia bumiputra yang memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas.

Abdul Rivai memiliki pemikiran yang kritis dan progresif. Ia secara terbuka mengkritik cara berfikir kaum bumiputra di Hindia Belanda yang terlalu tradisional dan religius. Tulisan-tulisannya pada sejumlah surat kabar Belanda menunjukkan hal itu. Ia pernah menyebut jika masyarakat Jawa tengah mengalami “demoralisasi” yang mengakibatkan kemerosotan kesejahteraan. Rivai dengan keras mengkritik sikap pemerintah kolonial yang enggan bersungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan bagi kaum bumiputra sehingga mengakibatkan demoralisasi tersebut (Poeze, 1989: 90). Bagi Rivai, perluasan pendidikan Barat merupakan solusi untuk memperbaiki kemerosotan kesejahteraan tersebut. Gagaran tersebut menunjukkan keinginan kuat Rivai untuk memajukan bangsa Hindia. Hal itu merupakan ciri khas pemikiran para intelegensia bumiputra pada awal abad kedua puluh yang meyakini jika pendidikan dapat menyelamatkan kaum bumiputra dari kemerosotan kesejahteraan (Nagazumi, 1989: 32-33).

Abdul Rivai melanjutkan usahanya untuk memajukan kaum bumiputra melalui bidang pers. Ia lalu bertemu dengan seorang mantan perwira KNIL bernama H.C.C. Clockener Brousson. Keduanya sepakat untuk menerbitkan sebuah surat

kabar yang bertujuan untuk memajukan kaum bumiputra di Hindia Belanda. Surat kabar tersebut bernama *Bintang Hindia* yang terbit pertama kali pada 1 Januari 1903. Kemunculan *Bintang Hindia* ini menjadi sebuah titik penting bagi perkembangan wacana *kemadjoean* di Hindia Belanda. Rivai yang mendapat tugas mengurus isi majalah secara konsisten mampu menampilkan wacana *kemadjoean* tersebut dalam setiap edisi *Bintang Hindia*. Pemikiran Rivai banyak dipengaruhi oleh kehidupannya di Belanda. Stimulus semacam ini yang membuat pemikirannya memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan para redaktur surat kabar lain yang berada di Hindia Belanda (Niel, 2009: 80).

Sebagai seorang intelegensia bumiputra, Rivai menunjukkan perhatian terhadap isu-isu sosial kaum bumiputra. Hal tersebut ia tunjukkan dalam berbagai artikelnya pada *Bintang Hindia*. Sebagai contoh, ia memberi suatu identitas kolektif bagi intelegensia bumiputra yang ia beri nama *kaoem moeda*. *Kaoem Moeda* menurut Rivai adalah “. . . *semoea orang hindia (toea dan moeda) jang tidak soeka lagi memegoet atoeran koeno, adat koeno, kebiasaan koeno, tetapi jang maoe memoeliakan diri dengan pengetahoean dan ilmoe.*” (*Bintang Hindia*, no. 14, tahun 1905). Selain itu, dalam artikel yang sama Rivai juga menegaskan jika “. . . *Pekerdjaan orang hindia jang boleh menimboelkan paedah boleh dan kebadjikan boeat anaknegeri, mesti dibantoe bersama-sama.*” (*Bintang Hindia*, no. 14, tahun 1905). *Kaoem Moeda* bagi Abdul Rivai harus memiliki pendidikan tinggi. Ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui proses pendidikan tersebut harus mampu digunakan untuk memajukan sesama kaum bumiputra. Dengan demikian, Abdul Rivai menekankan jika *kaoem moeda* jangan hanya mengutamakan kepentingan dirinya saja, tetapi juga harus peka dengan isu-isu sosial

yang berkaitan dengan kemajuan kaum bumiputra.

Abdul Rivai juga menyampaikan suatu gagasan baru yang menarik sebagai lanjutan dari gagasan *kaoem moeda*. Rivai meyakini jika *kaoem moeda* harus diorganisir agar dapat menjalankan tugas-tugasnya memajukan kaum bumiputra di Hindia Belanda. Gagasan tersebut ia beri nama *perhimpoean kaoem moeda*. *Perhimpoean kaoem moeda* menurut Rivai “. . . mesti bekerdja dan boleh sampai maksoednja, saja meoe terangkan disini bagaimana maksoed jang terseboet diangka 2 pada permoelaan karangan ini mesti didjalankan: Pengadjaran anak-negeri mesti dimadjoekan oleh Perhimpoean Kaoem Moeda.” (*Bintang Hindia*, no. 14, tahun 1905). Abdul Rivai meyakini jika kaum bumiputra harus memiliki solidaritas agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam mencapai kemajuan dan *kaoem moeda* harus berperan sebagai pionir dalam upaya tersebut (T. Abdullah, 1972: 220). Gagasan membentuk suatu organisasi bagi *kaoem moeda* tentu merupakan suatu ide yang sangat radikal pada masa itu. Sebelumnya belum pernah ada satu orangpun yang membayangkan jika kaum bumiputra dapat membentuk organisasi sosial-politik untuk memajukan bangsanya. Akan tetapi, Rivai berani mengutarakan gagasannya tersebut secara terbuka lewat *Bintang Hindia*.

Abdul Rivai tidak hanya berhenti pada gagasan *kaoem moeda* dan *perhimpoean kaoem moeda*. Untuk menegaskan perbedaan identitas antara intelegensia bumiputra dan elit bumiputra lain termasuk para *pangreh praja*, Rivai memperkenalkan gagasan *bangsawan fikiran*. Mengenai hal tersebut, ia menuliskan demikian:

Dari hal „Bangsawan Oesoel” itoe ta” oesahlah kita „berpandjangan” kalam, karena bangsawan ini ialah soeatoe takdir djoea. Djika nenek-mojang kita oleh sebab jang atjapkali tiada disengadja pada

zaman poerbakala terhitoeng didalam kaoem orang bangsawan, maka njatalah kita *poen*, orang jang berbangsa walaupun pengetahuan dan kepandaian kita seperti „kodok dibawah tempoeroeng.” Nistjajalah kita berhak, akan berbesar diri akan tetapi, djika ada orang, jang tiada hendak mengindahkan hak itoe, maka *tiadalah* boleh kita berketjil hati. Sebabnja maka demikian, karena kita hidoep sekarang di abad jang ke XX. Didalam zaman ini djaranglah orang bertanja sebagai doeloe kala:

siapa dia?

Sekarang orang bertanja:

Bagaimana dia?

Kekoeatan badan, ketinggian bangsa dan kemoeliean oesoel tiadalah fasal jang pertama lagi, akan mendjadi orang jang terbilang. Sekarang bolehlah kepandaian dan ilmoe mengatoerkan kedalambahagian manakah kita terhitoeng.

Keadaan inilah menimboelkan „Bangsawan fikiran” Sebagai sephohon kajoe jang toemboeh ditanah jang soeboer, maka „Bangsawan fikiran” ini bertambah lama, bertambah besar, semakin lama, semakin lebih tinggi dari „Bangsawan oesoel” (*Bintang Hindia*, No. 11, tahun 1906).

Artikel tersebut menunjukkan pandangan Rivai terhadap intelegensia bumiputra dan elit bumiputra lainnya. Istilah *bangsawan fikiran* dapat disamakan dengan intelegensia bumiputra, sementara *bangsawan oesoel* memiliki arti yang sama dengan elit bumiputra lainnya. Rivai meyakini jika keistimewaan yang didapatkan seseorang atas dasar keturunan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sebagai gantinya,

orang-orang yang berpendidikan dan memiliki ilmu pengetahuan yang akan dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, ilmu serta pengetahuan adalah hal yang lebih penting dibandingkan dengan status sosial atau garis keturunan seseorang. Gagasan *bangsawan fikiran* ini secara langsung juga mengkritik para *pangreh praja* yang berkuasa karena garis keturunan mereka. Secara tidak langsung, gagasan ini juga mengkritik feodalisme yang masih jamak dipraktikkan oleh kaum bumiputra pada masa itu.

Gagasan Abdul Rivai rupanya tidak selamanya mendapatkan dukungan dari redaktur lain di *Bintang Hindia*. Ia justru mulai mengalami berbagai kendala selama menjadi redaktur *Bintang Hindia*. Salah satunya ialah konflik yang ia hadapi dengan sahabatnya, Clockener Brousson. Clockener Brousson ingin agar Rivai lebih berhati-hati lagi dalam menuliskan pendapat dalam *Bintang Hindia* (*Bintang Hinda* No. 9 tahun 1905). Brousson juga menolak untuk merealisasikan gagasan *perhimpoean kaoem moeda* yang digagas oleh Rivai (*Bintang Hindia* No. 23 tahun 1905). Sikap Brousson tersebut membuat Rivai sangat kecewa. Ia merasa jika gagasan-gagasan progresifnya justru kerap dihalangi oleh rekannya sendiri. Kegagalannya menyelesaikan konflik dengan Brousson membuatnya terpaksa meninggalkan *Bintang Hindia* pada tahun 1907. Sepeninggal Rivai, *Bintang Hindia* kehilangan sosok utama yang selama ini menjadi nahkoda surat kabar tersebut. *Bintang Hindia* kemudian berhenti terbit di tahun yang sama dengan keluarnya Rivai

Selepas keluar dari *Bintang Hindia*, Abdul Rivai kembali fokus untuk menyelesaikan studinya. Rivai memiliki ambisi untuk meraih gelar doktor. Akan tetapi pada saat yang bersamaan ia juga ingin segera kembali ke Hindia Belanda. Untuk itu, ia pergi ke Universitas Gent di Belgia. Alasan Rivai melanjutkan studi ke Universitas Gent karena untuk menjadi

doktor di Belgia pada masa itu tidak wajib membuat disertasi. Gelar doktor dapat diraih lewat sebuah ujian terbuka. Rivai berhasil meraih gelar doktor lewat jalur tersebut pada tanggal 23 Juli 1908 (Poeze, 2008: 56). Dengan demikian, Abdul Rivai menjadi doktor pertama dari kalangan bumiputra. Sebuah pencapaian akademik yang bahkan tidak semua orang Eropa mampu meraihnya.

Setelah menyelesaikan studinya, Abdul Rivai kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1910. Sebagai doktor lulusan Eropa, mencari pekerjaan bukanlah hal yang sulit dilakukan oleh Rivai. Ia segera mendapatkan pekerjaan sebagai petugas medis bagi tentara kolonial di Cimahi, Jawa Barat (Pols, 2019: 48). Dua tahun berselang ia pindah ke Padang untuk bekerja di Dinas Kesehatan Kolonial. Selain berkarir sebagai pegawai kolonial, Rivai juga membuka praktik pribadi. Kemampuan medis yang didapatkannya dari Eropa membuatnya mudah mendapatkan banyak pelanggan dan menjadi salah satu dokter bumiputra paling sukses secara finansial pada masanya. Selain berkarir dalam dunia medis, Rivai juga aktif dalam bidang politik dengan bergabung pada *Volksraad* pada tahun 1918. Di *Volksraad*, ia cukup vokal menyuarakan pentingnya pendidikan untuk kemajuan kaum bumiputra.

Akhir dasawarsa kedua abad XX merupakan titik balik perjalanan hidup Abdul Rivai. Ia didiagnosa mengidap penyakit diabetes dan tuberkolosis (Pols, 2019: 51). Ia kemudian pergi ke Paris pada tahun 1919 untuk mengobati penyakitnya tersebut. Di Paris, ia mendapatkan fasilitas pengobatan paling modern pada masa itu berupa terapi penyinaran dan elektroterapi. Ia kembali lagi ke Hindia Belanda dua tahun berselang. Pada tahun 1926, ia terpaksa kembali ke Eropa lagi, kali ini ke Swiss untuk mengobati penyakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Ia menetap disana selama lima tahun dan baru

kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1931. Tiga tahun berselang tepatnya tanggal 16 Oktober 1934, Rivai menghembuskan nafas terakhir di Bandung akibat penyakit yang dideritanya.

Perjuangan Abdul Rivai dalam memajukan kaum bumiputra merupakan potret dari salah satu intelegensia bumiputra pada awal abad kedua puluh. Sebagaimana elit bumiputra terpelajar yang muncul pada permulaan abad kedua puluh, Rivai memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial kaum bumiputra. Berbagai kritik serta gagasan yang ia sampaikan menunjukkan dengan jelas perhatiannya terhadap kondisi sosial kaum bumiputra yang pada masa itu sedang mengalami kemerosotan. Pilihan Rivai untuk berjuang melalui jalan pers juga merupakan hal yang relatif baru pada masa itu. Surat kabar *Bintang Hindia* merupakan media yang tepat untuk menyebarkan gagasan Rivai. Gagasan Rivai kemudian banyak diadopsi oleh intelegensia bumiputra pada era setelahnya. Setelah berhenti dari *Bintang Hindia* dan meraih kesuksesan dalam karirnya sebagai dokter, Rivai sama sekali tidak berhenti memperjuangkan kemajuan bumiputra. Kali ini ia berjuang melalui Volksraad. Terlepas berhasil atau tidaknya perjuangan tersebut, Abdul Rivai dapat dikatakan sebagai pionir intelegensia bumiputra yang berjuang memajukan kaum bumiputra di Hindia Belanda baik melalui jalan pers ataupun melalui perjuangan parlemen.

### Kesimpulan

Perubahan kebijakan pendidikan di Hindia Belanda pada mulanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan tenaga birokrasi semata. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial sama sekali tidak memiliki orientasi untuk memajukan kaum bumiputra. Elit bumiputra merupakan kelompok sosial yang pertama-tama memperoleh pendidikan Barat. Pendidikan Barat dijadikan sebagai sarana simbiosis

mutualisme antara elit bumiputra dan pemerintah kolonial untuk mempertahankan dominasi serta prestise atas rakyat biasa. Pada akhir abad kesembilan belas, kegagalan ekonomi liberal serta kebijakan politik etis memunculkan kelompok sosial baru yang terpengaruh dengan ide serta pemikiran Barat serta memiliki perhatian terhadap isu-isu sosial. Kelompok sosial ini dikenal dengan istilah intelegensia bumiputra.

Abdul Rivai merupakan potret intelegensia bumiputra yang cukup berpengaruh pada awal abad kedua puluh. Perubahan sosial di Minangkabau mendorongnya untuk menempuh pendidikan tinggi agar mampu mencapai taraf hidup yang lebih baik. Rivai tidak hanya puas dengan itu melainkan berupaya untuk mengenyam pendidikan hingga ke Eropa, tempat yang ia yakini sebagai pusat kemajuan masyarakat dunia. Di Belanda, Rivai tidak hanya fokus pada karir akademiknya semata, akan tetapi juga peduli terhadap isu-isu sosial di Hindia Belanda. Gagasannya dalam *Bintang Hindia* merupakan suatu stimulus yang memberikan kesadaran sosial politik bagi kaum bumiputra. Meskipun karirnya di *Bintang Hindia* berakhir mengecewakan, ia berhasil meraih gelar akademik tertinggi. Sepulang dari Eropa, ia memiliki karir yang cukup baik dalam dunia medis dan bahkan tetap aktif memperjuangkan kemajuan kaum bumiputra lewat *Volksraad*. Sekalipun hidupnya berakhir dengan tragis, Abdul Rivai tetaplah harus diakui sebagai salah satu pionir intelegensia bumiputra yang memberi warna dalam dinamika sosial politik di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh.

### DAFTAR PUSTAKA:

- Abdullah, A. (2017). Ethical Politic and Emergence of Intellectual Class. *Paramita: Historical Studies Journal*, 27(1), 34–49.

- Abdullah, T. (1972). Modernization In The Minangkabau World: West Sumatra In The Early Decade of the Twentieth Century. In Claire Holt (Ed.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Buchori, M. (2007). *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool Sampai ke IKIP 1852-1998*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Colombjin, F. (2005). A Moving History of Middle Sumatra, 1600-1870. *Modern Asian Studies*, 39.
- Elizabeth E. Graves. (2007). *Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Frankema, E. (2013). Why was the Dutch Legacy So Poor? *Masyarakat Indonesia*, 39(2), 307–326.
- Hoogervorst, T., & Nordholt, H. S. (2017). Urban Middle Classes in Colonial Java ( 1900 – 1942 ) Images and Language. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 173, 442–474.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latif, Y. (2012a). *Intelegensia Muslim dan Kuasa*. Jakarta: Demokrasi Project.
- Latif, Y. (2012b). *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, D. (2008). *Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nagazumi, A. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Niel, R. Van. (2009). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Poeze, H. (1989). Early Indonesian emancipation; Abdul Rivai, van Heutsz and the Bintang Hindia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 145 (1), 87–106.
- Poeze, H. (2008). *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Belanda (1600-1950)*. Jakarta: Penerbit KPG.
- Pols, H. (2019). *Merawat Bangsa: Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahzen, dkk, T. (2007). *Tanah Air Bahasa*. 2007: I:BOEKOE.
- Simbolon, P. T. (2006). *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sjamsudin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suratminto, L. (2013). Educational Policy In The Colonial Era. *Historia: International Journal of History Education*, XIV(1), 77–84.
- Suryani, A., Zed, M., & Hardi, E. (2019). STUDI KOMPARATIF : SISTEM TANAM PAKSA SUMATERA BARAT DENGAN JAWA ABAD 19. *Jurnal Kapita Selekt Geografi*, 2 (4), 11–20.
- Sutherland, H. (1983). *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.

#### Surat Kabar:

*Bintang Hinda*, No. 9 tahun 1905

*Bintang Hindia*, No. 14, tahun 1905

*Bintang Hindia*, No. 23 tahun 1905

*Bintang Hindia*, No. 11, tahun 1906